

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Karakter berbasis Nilai dan Moral Pancasila

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila telah kita terima sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional yang berfungsi sebagai salah satu pilar negara kebangsaan Indonesia. Dalam konteks pendidikan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima sebagai landasan pendidikan nasional. Oleh karena itu Pancasila sebagai ide, nilai, dan norma sudah seharusnya dipahami, dihayati, diamalkan, dan dilestarikan. Seluruh komponen bangsa harus meyakini dan tidak perlu ragu tentang perlunya pembangunan bangsa dan karakter berbasis nilai dan moral Pancasila. Komitmen tersebut harus dimaknai sebagai kristalisasi dari semangat kebangsaan yang secara historis tumbuh kembang sejak era Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berpuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kegalauan seluruh komponen bangsa tentang kondisi bangsa yang dirasakan mengkhawatirkan saat ini, dan prospek bangsa dan negara Indonesia di masa depan, sangatlah beralasan. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan, simposium dan sejenisnya yang saat ini marak di seluruh wilayah Indonesia, merupakan indikator yang kuat bahwa seluruh komponen bangsa memiliki komitmen kebangsaan yang sangat kuat. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan nasional yang komprehensif, koheren, dan berkelanjutan. Dalam Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter (Republik Indonesia:2010) ditegaskan bahwa "...pengembangan seluruh aspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses "menjadi". Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa (1) karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya

karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada “...tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.”

Pendidikan kewarganegaraan, sebagai suatu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah memiliki visi dan misi nasional mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi warga negara yang **cerdas, jujur, peduli, dan tangguh**, dengan Pancasila sebagai substansi inti (*core*) dari isi dan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan dihayati secara utuh dan pada akhirnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Modul ini merupakan substansi awal dari 9 (sembilan) substansi yang harus Anda pelajari dalam Mata Kuliah **Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan**. Secara khusus, dengan mempelajari modul ini diharapkan Anda menguasai kemampuan:

1. menjelaskan visi dan misi PKn sebagai pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air; dan
2. menganalisis muatan nilai dan moral Pancasila dalam kerangka pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air.

Untuk itu dalam modul ini Anda harus mempelajari dua pokok bahasan sebagai berikut.

1. Kegiatan Belajar 1.

Visi dan misi PKn sebagai pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air.

2. Kegiatan Belajar 2.

Muatan nilai dan moral Pancasila dalam kerangka pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air.

Kegiatan Belajar 1

Visi dan Misi PKn sebagai Pendidikan Karakter Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler merupakan wahana/kendaraan yang akan mengantarkan individu warga negara mencapai tujuan menjadi insan Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara makro-nasional Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu komponen pendidikan guna mewujudkan komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia. Ia merupakan wahana *nation and character building* (Soekarno 1963) yang secara konstitusional hal itu dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Secara historis komitmen tersebut merupakan kristalisasi dari semangat kebangsaan seperti yang tumbuh kembang melalui gerakan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berpuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Seperti dinyatakan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (Republik Indonesia, 2010:1), situasi dan kondisi karakter bangsa saat ini sangat memprihatinkan. **Prilaku koruptif** telah menggejala di berbagai ranah birokrasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; **konflik dan kekerasan** yang bersifat horizontal antar warga masyarakat dan yang bersifat vertikal antara warga masyarakat dengan unsur pemerintah, seperti dengan para penegak hukum juga semakin tak terkendali; dan prilaku **nir-etis/a-moral** begitu marak dipertunjukkan oleh wakil rakyat dan pejabat publik seperti terekam dalam berbagai media massa. Kondisi yang cenderung anarkis itu mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif dengan memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Karena itu pembangunan karakter bangsa harus dijadikan **arus utama** pembangunan nasional. Hal itu harus dimaknai bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pengembangan karakter. Hal tersebut secara konstitusional sesungguhnya sudah tercermin dari misi pembangunan nasional yang memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), digariskan

komitmen “...terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks.”

Dalam konteks itu pembangunan karakter bangsa harus dilihat dalam cakupan dan tingkat urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Dilihat dari substansinya kebijakan tersebut sangatlah luas karena memang secara substantif dan operasional terkait dengan “...pengembangan seluruh aspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses “menjadi”. Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa: (1) karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada “...tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.” (Republik Indonesia, 2010:2-3).

Perhatikan kutipan berikut ini.

“...pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya **budi pekerti (kekuatan batin, karakter)**, pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu **tidak boleh dipisahkan** agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.” (*Ki Hajar Dewantoro*)

Sebagai latihan, coba Anda cermati kata-kata dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro tersebut. Ungkapkan dengan kata-kata Anda sendiri apakah makna dan fungsi pendidikan dalam pembangunan karakter bangsa. Mengapa unsur budi pekerti, pikiran, dan tubuh dalam arti jasmani tidak boleh dipisahkan?

Kebijakan Nasional tersebut (2010: 4) pembangunan karakter bangsa secara fungsional memiliki tiga fungsi utama: **Pembentukan dan Pengembangan; Potensi Perbaikan dan Penguatan; dan Fungsi Penyaring.** Dalam fungsinya sebagai proses pembentukan dan pengembangan potensi, pembangunan karakter bangsa memusatkan perhatian pada pembentukan dan pengembangan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan nilai, norma dan moral Pancasila. Dalam fungsinya sebagai sarana perbaikan dan penguatan pembangunan karakter bangsa memusatkan perhatian pada perbaikan dan penguatan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam fungsinya sebagai wahana penyaring pembangunan karakter bangsa berfungsi memilah unsur-unsur budaya bangsa sendiri dan menyaring unsur-unsur budaya bangsa lain yang dinilai atau dirasakan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter Pancasila.

Ditegaskan bahwa “...ketiga fungsi tersebut dilakukan melalui (1) pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) pengukuhan nilai dan norma konstitusional UUD 45, (3) penguatan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (4) penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi *Bhinneka Tunggal Ika*, serta (5) penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam konteks global.”

Adapun yang menjadi tujuan (Kebijakan Nasional, 2010: 5) dari pembangunan karakter bangsa adalah “...untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Untuk itu maka Pembangunan Karakter Bangsa harus disikapi dan diperlakukan sebagai suatu gerakan nasional yang harus menjadi komitmen seluruh komponen bangsa dengan tema dasar “...**membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.**”

Melihat sifat yang komprehensif dan kompleks dari pembangunan karakter bangsa tersebut, telah ditetapkan yang menjadi lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa mencakup ranah sebagai berikut (Kebijakan Nasional, 2010:5-6).

1. **Lingkup keluarga** yang “...merupakan wahana pembelajaran dan pembiasaan karakter yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga terhadap anak sebagai anggota keluarga sehingga diharapkan dapat terwujud keluarga berkarakter mulia yang tecermin dalam perilaku keseharian.”
2. **Lingkup satuan pendidikan** yang “...merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.”
3. **Lingkup pemerintahan** yang “...merupakan wahana pembangunan karakter bangsa melalui keteladanan penyelenggara negara, elite pemerintah, dan elite politik. Unsur pemerintahan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter bangsa karena aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan karakter pada tataran informal, formal, dan nonformal.” Pemerintahlah yang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam
4. **Lingkup masyarakat sipil** yang “...merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter melalui keteladanan tokoh dan pemimpin masyarakat serta berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan sehingga nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi menjadi perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari”.
5. **Lingkup masyarakat politik** yang “...merupakan wahana yang melibatkan warga negara dalam penyaluran aspirasi dalam politik. Masyarakat politik merupakan suara representatif dari segenap elite politik dan simpatisannya. Masyarakat politik memiliki nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik

memiliki dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat.”

6. **Lingkup dunia usaha** dan Industri yang “...merupakan wahana interaksi para pelaku sektor riil yang menopang bidang perekonomian nasional. Kemandirian perekonomian nasional sangat bergantung pada kekuatan karakter para pelaku usaha dan industri yang di antaranya dicerminkan oleh menguatnya daya saing, meningkatnya lapangan kerja, dan kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri.”
7. **Lingkup media massa** yang “...merupakan sebuah fungsi dan sistem yang memberi pengaruh sangat signifikan terhadap publik, khususnya terkait dengan pembentukan nilai-nilai kehidupan, sikap, perilaku, dan kepribadian atau jati diri bangsa. Media massa, baik elektronik maupun cetak memiliki fungsi edukatif atau pun nonedukatif bergantung dari muatan pesan informasi yang disampaikannya.”

Dalam konteks cakupan pembangunan karakter secara makro di muka, maka Pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler yakni sebagai suatu mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, merupakan wahana utama pembangunan karakter pada lingkup satuan pendidikan. Sementara itu lingkup pembangunan karakter dalam cakupan lainnya akan merupakan lingkungan yang mewarnai pembangunan karakter bangsa pada cakupan satuan pendidikan.

Secara konseptual **karakter** diartikan sebagai “... nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatrit dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan”. Sedangkan karakter bangsa dimaknai sebagai kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. (Kebijakan Nasional:2010:7) Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, komitmen terhadap

NKRI, dan kesadaran akan hakikat keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. Atas dasar itu, maka pembangunan bangsa dan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Oleh karena itu, pembangunan Karakter Bangsa harus dimaknai sebagai “... upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi IPTEK berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” (Kebijakan Nasional, 2010:7) Untuk mengejawantahkan gagasan dan komitmen pembangunan karakter bangsa tersebut ditetapkan sejumlah strategi dasar yang mencakup “...proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara”. Salah satu wahana pembangunan karakter melalui pendidikan adalah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Perhatikan gambar berikut ini.



Sumber: Koleksi Humas Kemdiknas

Gambar 1.1
Pengibaran Bendera Merah Putih

Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, makna dan pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba Anda diskusikan apa yang dimaksud wahana *nation and character building* yang secara konstitusional dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945!
- 2) Kemukakan kembali bahwa pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada tiga tataran besar!
- 3) Kemukakan kembali yang dimaksud sasaran pembangunan karakter bangsa sesuai kebijakan Nasional mencakup ranah apa saja. Dan Jelaskan seperlunya!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Coba pelajari kembali Visi dan misi PKn sebagai Pendidikan Karakter Kebangsaan dan Cinta Tanah Air pada kegiatan 1 dalam awal pendahuluan
- 2) Anda pelajari kembali pada materi yang membahas tentang pembangunan karakter bangsa.
- 3) Coba pelajari kembali materi yang membahas sasaran pembangunan karakter sesuai kebijakan nasional tersebut



RANGKUMAN

- 1) Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana/kendaraan yang akan mengantarkan individu warga negara mencapai tujuan menjadi insan Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan merupakan salah satu komponen pendidikan guna mewujudkan komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia. Ia merupakan wahana *nation and character Building*.
- 2) Kondisi yang cenderung anarkis itu mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif dengan memprioritaskan pembangunan karakter bangsa dan menjadikannya sebagai arus utama pembangunan nasional.
- 3) Karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS merupakan amanat yang harus diwujudkan.
- 4) Pengembangan seluruh aspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional yang mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses perlu mendapat perhatian, penguatan, dan perwujudan.
- 5) Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa yang tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat.
- 6) Pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak.
- 7) Pembangunan karakter bangsa secara fungsional memiliki tiga fungsi utama: pembentukan dan pengembangan; potensi perbaikan dan penguatan; dan fungsi penyaring, yang harus disikapi dan diperlakukan sebagai suatu gerakan nasional yang harus menjadi komitmen seluruh komponen bangsa dengan tema membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.
- 8) Satuan pendidikan yang merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan: pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran; pengembangan

budaya satuan pendidikan; pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.

- 9) Karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang.
- 10) Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, komitmen terhadap NKRI, dan kesadaran akan hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana/kendaraan yang ...
 - A. berguna bagi individu warga negara mencapai tujuan menjadi insan Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
 - B. hanya merupakan salah satu komponen pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan kenegaraan
 - C. sukar digunakan untuk mewujudkan komitmen berbangsa dan bernegara
 - D. merupakan wahana konseptual untuk membangun karakter bangsa.
- 2) Kondisi yang cenderung anarkis itu mendorong pemerintah untuk...
 - A. mengkritisi pembangunan karakter bangsa dan menjadikannya sebagai pelajaran yang perlu ditinggalkan.
 - B. secara proaktif melakukan pembangunan karakter bangsa dan menjadikannya sebagai proyek pemerintah.
 - C. merefleksikan pembangunan karakter bangsa pada masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan.
 - D. memprioritaskan pembangunan karakter bangsa dan menjadikannya sebagai arus utama pembangunan nasional.

- 3) Karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan...
 - A. wawasan manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS merupakan amanat yang harus diwujudkan.
 - B. kecenderungan manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS merupakan amanat yang harus diwujudkan.
 - C. watak dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS merupakan amanat yang harus diwujudkan.
 - D. perspektif manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS merupakan amanat yang harus diwujudkan.
- 4) Pengembangan seluruh aspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini...
 - A. sudah rusak dan perlu diganti dengan hal baru
 - B. sedang dalam proses yang perlu mendapat perhatian, penguatan, dan perwujudan
 - C. masih bersifat embrional dan perlu disemaine kembali
 - D. sudah ketinggalan jaman untuk diganti dengan mengadopsi dimensi internasionalisme
- 5) Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa yang tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus...
 - A. dibentuk secara paksa untuk menjadi bangsa yang bermartabat.
 - B. dibangun secara perlahan untuk menjadi bangsa yang bermartabat
 - C. dibangun dan dibentuk secara sistemik menjadi bangsa yang bermartabat
 - D. dibentuk melalui keteladanan untuk menjadi bangsa yang bermartabat

- 6) Pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak yang...
 - A. dibedakan satu sama lain agar kita dapat memajukan keberagaman hidup anak-anak.
 - B. tidak boleh dipisahkan satu sama lain agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak.
 - C. diprioritaskan salah satu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak secara bertahap.
 - D. dikembangkan secara sendiri-sendiri sehingga satu sama lain saling memacu.

- 7) Pembangunan karakter bangsa secara fungsional memiliki tiga fungsi utama: pembentukan dan pengembangan; potensi perbaikan dan penguatan; dan fungsi penyaring, yang harus disikapi dan diperlakukan sebagai suatu ...
 - A. kegiatan sistemik nasional yang harus menjadi komitmen seluruh komponen bangsa dengan tema membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.
 - B. gerakan kolaborasi seluruh komponen bangsa dengan tema membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.
 - C. proyek nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan tema membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.
 - D. kepedulian dari seluruh komponen bangsa dengan tema membangun generasi Indonesia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.

- 8) Satuan pendidikan yang merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter perlu melakukan pengembangan karakter secara holistik dalam bentuk penerapan pendekatan ...
 - A. terintegrasi dalam semua mata pelajaran
 - B. pengembangan budaya satuan pendidikan
 - C. kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
 - D. pembiasaan perilaku dalam kehidupan satuan pendidikan

- 9) Karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatrit dalam diri yang terejawantahkan dalam....
- perilaku ajek yang secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang
 - wawasan sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang
 - kemampuan yang lahir dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang
 - perilaku kontekstual dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang
- 10) Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ...
- norma UUD 1945, dan komitmen terhadap NKRI
 - komitmen terhadap NKRI, dan kesadaran akan hakikat keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*
 - norma UUD 1945, dan kesadaran akan hakikat keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*
 - norma UUD 1945, komitmen terhadap NKRI, dan kesadaran akan hakikat keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Muatan Nilai dan Moral Pancasila dalam Kerangka Pendidikan Karakter Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Kita tentu sudah sama-sama paham bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi negara dan bangsa dan masyarakat Indonesia, maka dalam pembangunan karakter bangsa, melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila merupakan landasan dan substansi utama. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat substansial, pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia wajib memiliki watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental yang menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam rangka pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan, harus dilihat dan dimaknai sebagai suatu kesatuan sistem nilai yang utuh yang antar klaster/gugus nilai yang

terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang konsisten dan koheren. Untuk memahami keutuhan entitas Pancasila tersebut marilah kita cermati dan maknai simbolisasi nilai-nilai Pancasila yang digambarkan dalam Lambang Negara Burung Garuda berikut ini.



Gambar 1.2
Lambang Negara Burung Garuda

Marilah kita simak baik-baik makna yang ada di balik perisai yang berisi simbol-simbol kelima sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang disimbolkan dengan Bintang lima dan ditempatkan sebagai inti atau sentral dalam perisai itu. Pasti ini bukan kebetulan tetapi merupakan komitmen para pendiri Republik bahwa Republik Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler, tetapi merupakan sebuah negara yang ber-Ketuhanan YME. Empat sila lainnya, ditempatkan mengelilingi dan beririsan dengan simbol bintang lima Ketuhanan YME. Karena itu harus dimaknai bahwa sila Ketuhanan YME menjiwai keempat sila lainnya. Di situ tersirat komitmen utuh kehidupan yang ber-Ketuhanan YME dengan perwujudan kemanusiaan yang ber-Ketuhanan YME, persatuan Indonesia yang ber-Ketuhanan YME, kerakyatan yang ber-Ketuhanan YME, dan keadilan sosial yang ber-Ketuhanan YME.

Selanjutnya marilah kita pahami Pancasila secara historis. Bangsa dan Negara Republik Indonesia telah memiliki "komitmen" yaitu keterikatan yang teguh atas dasar keyakinan terhadap Pancasila. "Komitmen" ini secara historik dapat dibaca dari sejarah lahirnya Pancasila yang mempertemukan para pejuang Kemerdekaan Indonesia dalam wadah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan selanjutnya

melalui PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Secara konstitusional "komitmen" ini dapat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kenyataan ini dengan tegas memberikan petunjuk bahwa Pancasila dengan rumusannya yang resmi seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah diyakini, ditetapkan dan selanjutnya dipegang teguh sebagai pedoman tingkah laku negara dan warganya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya, hingga kini Pancasila telah diberi predikat sebagai pandangan hidup, dasar negara Republik Indonesia, dan ideologi nasional.

Predikat-predikat yang disandang oleh Pancasila ini akan memiliki makna dan arti yang luhur dan kokoh, apabila hal-hal yang terkandung dalam Pancasila itu dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena Pancasila merupakan rumusan nilai-nilai filosofik, normatif yang bersifat "abstrak" (tak bisa dilihat maupun diraba) maka dalam perwujudannya yang nyata diperlukan wahana pembudayaan yang salah satunya adalah melalui proses pendidikan, dalam hal ini secara kurikuler melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, nilai dan norma Pancasila yang bersifat abstrak itu akan terjembatani untuk dapat diinternalisasi oleh setiap individu. Secara historis kita mencatat upaya serius dari MPR untuk penjabaran nilai dan norma yang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila seperti termaktub dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978. Terlepas dari adanya persepsi yang melihat Pedoman itu sebagai hal yang membatasi keluasaan nilai Pancasila, secara instrumental penjabaran itu sangat bermanfaat bagi perencanaan kegiatan pembudayaan nilai Pancasila melalui proses pendidikan. Tentu saja jumlah rincian yang pada saat itu dibuat sebanyak 36 butir, harus dimaknai bukan hanya 36 butir nilai, tetapi antara lain 36 butir itu yang artinya di luar itu masih dapat dijabarkan secara lebih rinci sesuai dengan kebutuhan.

Bila kita membaca lebih jauh rincian dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu, kita akan menemukan hal-hal berikut ini.

- a. Pedoman tersebut diperlukan sebagai perwujudan "tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak" (Eka prasetya Pancakarsa. Eka artinya satu atau tunggal; prasetya artinya janji atau tekad; panca berarti lima; karsa artinya kehendak yang kuat dari bahasa Sanskerta).
- b. Pedoman itu berisikan pembahasan atau penjabaran kandungan nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih terperinci dan lebih sederhana

dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat.

- c. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan pedoman itu antara lain bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, manusia dipandang sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.
- d. Penyusunan Pedoman itu didasarkan pada asumsi adanya unsur kemauan dan kemampuan seseorang yang diperlukan dalam mengendalikan diri dan kepentingannya yang dianggap sebagai penentu terjadinya proses penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Setiap sila memiliki sejumlah nilai-nilai (kebaikan, kepatutan) yang khas, tetapi semuanya berada dalam satu konteks Pancasila sebagai suatu hal yang bulat dan utuh. Yang sudah diidentifikasi dalam P-4 ini ada 36 butir.

Bila kita lihat dari Aksiologi, yaitu suatu cabang studi Filsafat yang mempelajari teori-teori tentang nilai, dikemukakan bahwa salah satu pengertian tentang nilai ialah suatu "kualitas" yang ada dalam obyek yang dihadapi oleh manusia. Di lain pihak, nilai dapat juga dipandang sebagai hubungan antara obyek dan kalbu (pikiran dan perasaan) dengan mana obyek itu dihayati. Atau, barangkali secara sederhana nilai dapat diartikan sebagai sesuatu kualitas (kebaikan, kepatutan, kebenaran) tentang sesuatu menurut penghayatan manusia. Jadi, nilai-nilai Pancasila ialah kualitas yang ada dalam dan tentang Pancasila menurut penghayatan manusia Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan dan dituangkan dalam P-4 ialah sebagai berikut (Republik Indonesia: 1973).

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 1) Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
 - 3) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - 4) Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
 - 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - 2) Saling mencintai sesama manusia.
 - 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 - 4) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - 5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - 6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - 7) Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - 8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- c. Sila Persatuan Indonesia.
 - 1) Menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - 3) Cinta Tanah Air dan Bangsa.
 - 4) Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
 - 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Berbhineka Tunggal Ika.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 - 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
 - 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - 5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur..
 - 7) Keputusan ayng diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

- e. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- 1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - 2) Bersikap adil.
 - 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - 4) Menghormati hak-hak orang lain.
 - 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 - 6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 - 7) Tidak bersifat boros.
 - 8) Tidak bergaya hidup mewah.
 - 9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
 - 10) Suka bekerja keras.
 - 11) Menghargai hasil karya orang lain.
 - 12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Latihan.

Untuk selanjutnya, sebagai Latihan cobalah anda periksa, benarkah ke 36 butir nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh? Anda masing-masing diminta untuk memberikan jawabannya. Selanjutnya apakah tuntutan sikap menurut Pancasila?

Jika dilihat dari rumusannya, nilai-nilai yang dirumuskan dalam P-4 tersebut mengandung rumusan sikap, seperti percaya dan takwa, saling mencintai, cinta tanah air dan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan menghormati hak orang lain. Selain itu juga berupa perilaku seperti: tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, saling mencintai sesama manusia. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan suka bekerja keras. Karena itu perlu kita pahami apa yang sebenarnya sikap itu. Salah satu definisi sikap ialah: "Sikap adalah suatu kondisi kesiapan mental dan syaraf, yang diorganisasikan lewat pengalaman, yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamik terhadap tanggapan seseorang mengenai segala obyek dan situasi dengan mana sikap itu

berhubungan (Alport: 1967). Jadi, sikap bukanlah tingkah laku akan tetapi suatu kesiapan untuk memberikan respons tertentu apabila orang itu berhadapan dengan obyek atau situasi. Oleh sebab itu sikap sesungguhnya tidak bisa dilihat tapi disimpulkan dari tanda-tanda yang dapat diamati. Misalnya, mungkin anda mengatakan bahwa teman anda senang pada diri anda. Senang adalah suatu sikap yang disimpulkan dari tanda-tanda yang nampak, misalnya sering menegur, ramah, dan sebagainya. Setiap sikap memiliki unsur kognisi, afeksi, dan laku. Dengan lain perkataan suatu sikap terhadap suatu obyek apabila ada pengenalan, perasaan dan laku tentang obyek itu. Sedangkan prilaku adalah apa yang secara nyata atau kasat mata dilakukan oleh seseorang pada satu saat atau terus menerus.

Yang dimaksud dengan tuntutan sikap menurut Pancasila ini ialah jenis-jenis sikap dan/atau prilaku yang secara konsepsional terkandung dalam atau dimaksudkan oleh sila-sila Pancasila. Rincian nilai-nilai Pancasila merupakan prasyarat bagi pelaksanaan nilai-nilai itu oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu setiap orang perlu memiliki kognisi (pengetahuan) tentang kandungan nilai dalam setiap sila Pancasila, perasaan terikat pada nilai itu, dan tindakan nyata. Karena itu internalisasi dan pengamalan Pancasila harus merupakan suatu kesatuan kognisi, afeksi dan tingkah laku. Tentu saja pengamalan Pancasila akan lebih mantap apabila didahului oleh proses internalisasi atau penghayatan. Selain itu juga pengalaman dalam mengamalkan Pancasila akan memperkuat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Oleh karena itu, merupakan proses, maka penghayatan dan pengamalan itu tidaklah mengenal akhir. Dengan perkataan lain, setiap orang akan memiliki keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam berbagai segi kehidupan, akan tetapi derajatnya akan bervariasi dari individu satu ke individu yang lainnya. Yang perlu dipertanyakan ialah: Pada derajat mana seorang individu dapat dianggap telah menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Latihan

Cobalah Anda pikirkan mengenai hal ini. Ambillah sebagai contoh suatu butir rumusan nilai Pancasila kemudian anda kaji menurut pengalaman dan pengetahuan yang Anda miliki.

Di atas dikemukakan bahwa proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan proses psikologis dan proses sosial-kultural. Secara sederhana proses itu digambarkan sebagai suatu proses mengenal, mengerti, menghayati, mengamalkan dan memiliki kesadaran diri. Perbuatan mengenal dan mengerti merupakan bagian yang integral dari proses kognitif termasuk di dalamnya proses berpikir seseorang. Proses menghayati merupakan suatu proses afektif yakni proses psikologis yang menyentuh perasaan seseorang. Sedangkan proses mengamalkan merupakan tindakan nyata yang tentunya harus telah dilandasi oleh proses kognitif sebelumnya. Kesadaran diri merupakan suatu sikap yang dapat disimpulkan dari pengenalan, pengertian, penghayatan dan pengamalan.

Pancasila, yang di dalamnya termasuk agama dan kebudayaan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber nilai yang menuntut sikap. Untuk mewujudkan sikap inilah setiap individu warga negara seyogianya mengenal, mengerti, menghayati dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu, pengembangan segi-segi psikologis tentang tingkah laku menurut Pancasila menuntut dikembangkan proses *pemancasilaan* berbagai segi kehidupan. Untuk ini proses pendidikan melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu sarana yang pokok, karena proses pendidikan di samping merupakan suatu proses psikologis, juga merupakan proses sosial-kultural.

Secara teoritik sikap seseorang dipengaruhi oleh informasi, konteks sosial, dan kepribadian dan kebutuhan individu. Informasi adalah segala sesuatu yang oleh individu dapat dikenal atau dialami lewat proses penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan dan sebagainya). Konteks sosial ialah lingkungan terutama lingkungan manusia (sosial), dalam hal ini seseorang terlibat seperti keluarga, teman seusia, masyarakat, dan sebagainya. Sedangkan kepribadian ialah corak tingkah laku seseorang misalnya terbuka (*extrovert*) atau tertutup (*introvert*) (Krech dkk: 1962). Dilihat dari kerangka teoritik di atas maka sikap Pancasila seorang warga negara akan dipengaruhi oleh jenis informasi Pancasila yang dapat dikenal dan dialami; tempat di mana dan dengan siapa ia hidup dan bergaul; keterbukaan ia terhadap dunia di luar dirinya; dan jenis serta kebutuhan yang ia rasakan dan ia duga. Oleh karena setiap individu berbeda dalam segala dengan individu lainnya maka tingkat ke-Pancasilaan dan sikapnya pun akan berbeda. Sebagai contoh, meskipun kini usaha pemerataan informasi tentang Pancasila perlu dilakukan kembali melalui berbagai media.

Arah perubahan suatu sikap dapat berupa arah yang kongruen (serupa) atau tidak kongruen (tidak serupa). Misalnya, dari penuh tenggang rasa atau dari tidak hormat pada orang lain merupakan bentuk perubahan yang kongruen. Jadi, perubahan yang kongruen ini dapat berisi perubahan positif dan dapat pula negatif, tergantung pada isi sikap itu. Demikian juga perubahan tidak kongruen dapat bersifat positif misal dari bersikap tidak adil dan dapat pula bersifat sebaliknya dari bersikap adil ke bersikap tidak adil. Perubahan sikap yang dituntut oleh Pancasila, tentu perubahan sikap yang positif, misalnya dari tidak semena-mena terhadap orang lain menjadi menghargai orang lain (tidak kongruen) atau dari cinta terhadap sesama menjadi lebih cinta terhadap sesama manusia (teman sejawat).

Untuk mewadahi gagasan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa telah ditetapkan adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, maka proses pengembangan nilai-nilai tersebut akan dapat berlangsung secara sistematis, sistemik dan terencana. Oleh karena itulah, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus menerus diaktualisasikan. Penyempurnaan yang paling mendasar yang perlu dilakukan adalah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila menjadi watak atau karakter seluruh warga negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyempurnaan kurikulum tersebut merupakan sesuatu hal yang memang seyogyanya terjadi karena kurikulum apapun selalu memiliki sifat *progressively modifiable*. Lebih lagi karena pelajaran PKn sangat akomodatif terhadap keputusan-keputusan politik negara. Di samping itu, PKn pun sebagai domain ilmu pendidikan akomodatif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan.

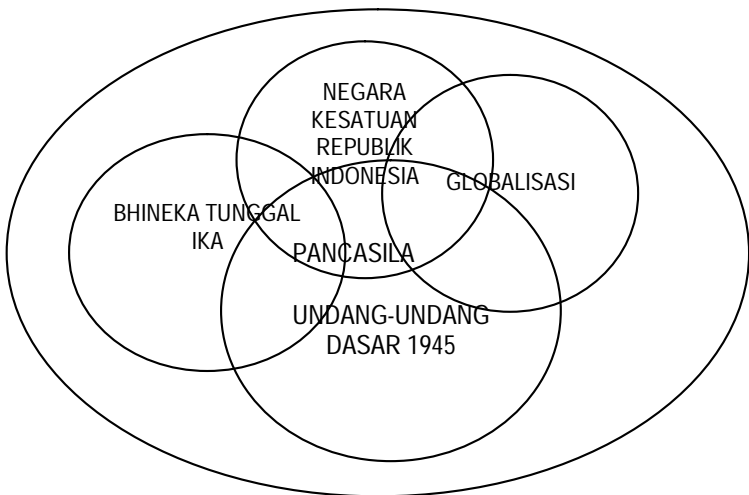
Bagaimana muatan Pendidikan Kewarganegaraan di SMP/MTs dan SMA/MAK?

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional Pasal 3 UU Sisdiknas: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" dengan menitik beratkan pada perspektif nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan

tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melainkan juga untuk mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, maka muatan pendidikan kewarganegaraan seyogianya mencakup, substansi sebagai berikut:

1. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa merupakan kerangka dasar dan substansi;
2. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan substansi dimensi konstitusional;
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia merupakan substansi khusus dalam UUD 1945;
4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh Indonesia dalam pergaulan antarbangsa merupakan substansi sosial-kultural yang mewadahi kehidupan; dan
5. substansi pergaulan antar bangsa dalam konteks globalisasi sebagai latar pergaulan Indonesia dalam kehidupan masyarakat dunia merupakan substansi pengayaan.

Konstelasi kelima substansi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.3
Konstelasi Lima Substansi

Dalam konsepsi itu Pancasila yang berisi ide, nilai, dan norma merupakan kerangka dasar dan substansi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berisi tatanan norma konstitusional merupakan substansi yang berisikan landasan struktural kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan yang mewadahi perwujudan nilai dan norma yang secara filosofis terkandung dalam Pembukaan. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu substansi yang diatur dalam UUD 1945 mengenai bentuk negara kesatuan yang sudah diterima sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sedangkan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, merupakan substansi yang memberi cerminan dasar dari konteks keberagaman yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Substansi pemer kaya tentang globalisasi, merupakan wahana untuk mewadahi interaksi Indonesia dalam pergaulan antar bangsa dalam konteks kehidupan masyarakat dunia.

Khusus mengenai Pancasila, untuk SMP/MTs dan SMA? MA dapat digambarkan tujuan akhir pembelajarannya sebagai berikut.

KELOMPOK KELAS SUBSTANSI UTAMA	KELAS 7 - 9 SMP (Formal Operasional: Orientasi tindakan dengan argumen dan konsekuensi, serta perilaku yang disepakati)	KELAS 10 - 12 SMA/SMK (Abstrak yang Diperluas: Memperhitungkan konsekuensi lebih jauh dan lebih otonom)
PANCASILA <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah (latar belakang, proses perumusan, proses pengesahan, dan perkembangannya). • Substansi (konsep, nilai, norma, dan moral) <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mampu membedakan antara yang baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteksnya. • Siswa membiasakan bertutur kata, berperilaku, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa memiliki pemahaman tentang sejarah, latar belakang, dan proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. • Siswa mampu membandingkan Pancasila dengan Ideologi lain. • Siswa mampu menganalisis aktualisasi Pancasila sebagai pandangan

	bersikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteksnya <ul style="list-style-type: none"> • Siswa memiliki pemahaman tentang sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara 	hidup, dasar negara, dan ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara <ul style="list-style-type: none"> • Siswa mampu membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
--	--	---



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Cobalah Anda periksa kembali, benarkah ke 36 butir nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh?
- 2) Kemukakan menurut pendapat Anda mencakup substansi apa saja dalam muatan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut!
- 3) Coba Anda jelaskan bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda pelajari kembali pada uraian materi yang membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut.
- 2) Anda pelajari kembali pada uraian materi yang membahas tentang substansi dalam muatan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut!
- 3) Anda pelajari kembali pada uraian materi yang membahas tentang bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional!



RANGKUMAN

- 1) Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum).
- 2) Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional.
- 3) Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4) Pembangunan karakter bangsa, melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila merupakan landasan dan substansi utama. Pembangunan karakter bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila.
- 5) Republik Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler, tetapi sebuah negara yang ber-Ketuhanan YME. Empat sila lainnya, ditempatkan mengelilingi dan berisikan dengan simbol bintang lima Ketuhanan YME. Oleh karena itu, harus dimaknai bahwa sila Ketuhanan YME menjiwai keempat sila lainnya.
- 6) Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 7) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- 8) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Berbhineka Tunggal Ika.
- 9) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- 10) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

- 11) Tuntutan sikap menurut Pancasila ini ialah jenis-jenis sikap dan/atau prilaku yang secara konsepsional terkandung dalam atau dimaksudkan oleh sila-sila Pancasila. Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu setiap orang perlu memiliki kognisi (pengetahuan) tentang kandungan nilai dalam setiap sila Pancasila, perasaan terikat pada nilai itu, dan tindakan nyata. Oleh karena itu, internalisasi dan pengamalan Pancasila harus merupakan suatu kesatuan kognisi, afeksi dan tingkah laku.
- 12) Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa merupakan kerangka dasar dan substansi utama Pendidikan Kewarganegaraan.
- 13) UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan substansi utama untuk dimensi konstitusional Pendidikan Kewarganegaraan.
- 14) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia merupakan substansi khusus dalam substansi UUD 1945 dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
- 15) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh Indonesia dalam pergaulan antarbangsa merupakan substansi sosial-kultural yang mewadahi kehidupan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan
 - A. memperhatikan nilai dan norma Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
 - B. menempatkan Pancasila sebagai sumber penyusunan perundang-undangan
 - C. merujuk pada nilai dan norma Pancasila dalam keseluruhan proses penyusunan dan implementasi perundang-undangan;
 - D. memasukan nomenklatur Pancasila dalam perumusan imperatif dalam perundang-undangan.

- 2) Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional, karena itu Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus....
 - A. dihayati oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - B. dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - C. dihayati, dipedomani, dan dimaknai oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - D. dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 3) Pembangunan karakter bangsa, melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila merupakan landasan dan substansi utama. Pembangunan karakter bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan....
 - A. mengisi makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila
 - B. mengusung cita-cita membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila
 - C. memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila
 - D. memiliki konteks ideal membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila
- 4) Republik Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler, tetapi sebuah negara yang ber-Ketuhanan YME. Empat sila lainnya ditempatkan mengelilingi dan beririsan dengan simbol bintang lima Ketuhanan YME. Karena itu harus dimaknai bahwa sila Ketuhanan YME menjiwai keempat sila lainnya sehingga menuntut upaya untuk....
 - A. membangun kemanusiaan Indonesia yang berkarakter iman dan takwa
 - B. memelihara persatuan dan kesatuan masing-masing agama yang ada di Indonesia
 - C. membangun demokrasi Indonesia yang berkarakter keyakinan agama
 - D. mengangkat semangat keadilan yang berdasarkan hukum-hukum agama

- 5) Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan wujud dari konsistensi....
 - A. dan koherensi antarsila Pancasila
 - B. antara sila pertama dan kedua Pancasila
 - C. antara sila pertama dan kedua Pancasila
 - D. dan koherensi antarsila Pancasila

- 6) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, dan Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, merupakan rumusan karakter yang bersumber dan bermuara pada sila....
 - A. pertama
 - B. kedua
 - C. keempat
 - D. kelima

- 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Berbhineka Tunggal Ika, merupakan karakter Pancasila mengandung nilai yang bersumber dari sila....
 - A. pertama dan kedua
 - B. kedua dan ketiga
 - C. ketiga dan keempat
 - D. keempat dan kelima

- 8) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan...
 - A. ide dasar demokrasi Pancasila yang dicita-citakan
 - B. instrumentasi demokrasi Pancasila yang ada dalam tatanan politik
 - C. praksis demokrasi Pancasila dalam berbagai konteks saat ini
 - D. Instrumentasi dan praksis demokrasi Pancasila yang harus dibangun

- 9) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial serta tuntutan sikap menurut Pancasila ini merupakan jenis-jenis...
 - A. sikap yang secara konsepsional terkandung dalam atau sila-sila Pancasila

- B. perilaku yang secara konseptual dimaksudkan oleh sila-sila Pancasila jenis-jenis sikap dan/atau perilaku yang secara konseptual terkandung dalam atau dimaksudkan oleh sila-sila Pancasila
 - C. sikap dan perilaku yang secara konseptual terkandung dalam atau dimaksudkan oleh sila-sila Pancasila
 - D. sikap dan/atau perilaku yang secara konseptual yang dimuat Pancasila
- 10) Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila menjadi karakter Pancasila setiap orang perlu memiliki....
- A. kognisi tentang kandungan nilai dalam setiap sila Pancasila, yang dipahami dengan baik
 - B. perasaan terikat pada nilai-nilai Pancasila, yang diinternalisasi sepenuhnya
 - C. kognisi tentang nilai dalam setiap sila Pancasila, perasaan terikat pada nilai itu, dan tindakan nyata
 - D. suatu kesatuan kognisi, afeksi dan tingkah laku yang diterima sepenuhnya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) A
- 5) D
- 6) B
- 7) D
- 8) A
- 9) B
- 10) B

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) A
- 5) A
- 6) B
- 7) B
- 8) B
- 9) B
- 10) C

Daftar Pustaka

- Allen, J. 1960. The Role of Ninth Grade Civics in Citizenship Education. *The High School Journal*. 44, 3: 106-111.
- Banks, J. A. 1977. *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision Making*. Reading: Addison – Wesley Publishing.
- Banks, J. A. 1990. Citizenship for a Pluralistic Democratic Society in
Rauner, M. 1999. *Civic Education: An Annotated Bibliography*. CIVNET.
- Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. 1977. *Defining the Social Studies*, Virginia: National Council for The Social Studies.
- Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. 1978. *The Nature of the Social Studies*. Palm Spring: An ETS Publication.
- Brameld, T. 1965. *Education as Power*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Capra, F. 1998. *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Carr, W. dan Kemmis, S. 1986. *Becoming Critical: Education, Knowledge, and Action Research*. Victoria: Deakin University.
- Center for Civic Education/CCE. 1994. *Civitas: National Standards for Civics and Government*. Calabasas: CCE.
- Center for Indonesian Civic Education. 1999. *Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.
- Civitas International. 1998. *International Partnership for Civic Awareness Conference Report*. Strasbourg: Civitas International.
- Cogan, J. J. 1999. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED.

- Derricott, R., Cogan, J. J. 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Pag.
- Dufty, D. G. 1970. Designing Integrated Course. *Teaching About Society*. Sydney: Rigby.
- Gandal, M., Finn, Jr. C. E. 1992. *Freedom Papers: Teaching Democracy*. USA: United States Information Agency.
- Hahn, C. L. dan Torney-Purta, J. 1999. The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives, dalam *Social Education*, 63,7:425-431.
- Hartonian, H. M. 1992. The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony. *The Social Studies*. 83: 4, 160-163.
- Kemenko Kesra. 2010. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Kuhn, T. S. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Lickona, T. 1991. *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Majlis Luhur Taman Siswa. 1967. *Kumpulan Pemikiran Ki Hadjar Dewantoro tentang Pendidikan*. Jakarta.
- NCSS. 1994. *Curriculum Standars for Social Studies: Expectation of Excellence*. Washington.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.

- _____. 2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Winataputra, U.S. 1978. *A Pilot Study of the Implementation of the Area of Learning Moral Education of Pancasila in the 1075 SMA Curriculum in the Bandung Area*, (M.A. Postgraduate Project). Sydney: Macquarie University.
- _____. 2001. *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. (Disertasi). Bandung: PPs UPI
- _____. 1990a. *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah: Suatu Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 1990b. *Konsep dan Masalah Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah*. Jakarta: P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 2012. *Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis, Epistemologis, dan Kemasadepanan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.